

MENINGKATKAN PENGALAMAN OGP

Penulis utama Dolar Vasani
Kontributor Andreas Pavlou
Paul Maassen
Penyunting Susie Day
Desain & Layout Christiana Aretta

SEKRETARIAT CSO OGP INDONESIA

Penerjemah Alva Siregar

Penyunting Nanda Sihombing
Didik Purwandanu

A PUBLICATION OF THE OGP CIVIL SOCIETY HUB



KATA PENGANTAR

Kini masyarakat sipil di seluruh dunia yang berjuang demi pemerintah yang terbuka sedang menghadapi tren dikotomis. Di satu sisi, hukum memang telah membuka akses informasi yang lebih luas, meningkatkan transparansi, dan warga lebih terlibat dalam proses kebijakan. Terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah menegakkan hukum sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan dari dalam dan luar negeri. Di sisi lain, pemerintahan yang sama di kesempatan lain berusaha mengurangi kebebasan media dan masyarakat sipil dengan menetapkan hukum yang mengekang kebebasan individu serta akses publik terhadap informasi. Ini menjadi indikasi bahwa pemerintahan tersebut malah menjadi lebih tertutup.

Misalnya di Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2010 sangat progresif mempromosikan transparansi dan partisipasi publik dalam kebijakan dan proses anggaran terbuka, dan juga berfungsi sebagai alat memerangi korupsi. Sejak jatuhnya rezim Soeharto, masyarakat sipil (khususnya kelompok aktivis mahasiswa, organisasi pemerintahan tradisional, dan serikat buruh independen) yang kuat telah muncul dan bersikap vocal. Mereka aktif dan bergerak untuk perubahan sosial dan politik yang positif. Namun, baru-baru ini di 'Indonesia Baru', telah terjadi peningkatan iklim konservatif, dan kebebasan berserikat yang dinikmati oleh masyarakat sipil mulai berkurang oleh pembatasan yang diberlakukan pemerintah dengan kedok perang global melawan teror'. Juga ada dalih perlunya membatasi kelompok anarkis yang menggunakan isu agama, etnis atau isu-isu keragaman lain untuk kepentingan provokatif.

"Pemerintah telah berupaya untuk memperkenalkan sejumlah undang-undang baru termasuk UU Intelijen, RUU Keamanan Nasional, dan RUU Organisasi Massa (RUU ORMAS) yang merongrong hal-hal penting dalam kebebasan demokratis," kata Longgema Ginting, Direktur Greenpeace Indonesia. Sekalipun masyarakat sipil telah berupaya untuk mengajukan amandemen, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui RUU ORMAS yang kontroversial pada awal Juli 2013. Masyarakat sipil saat ini akan mengajukan keberatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Di Kroasia, parlemen mengadopsi Undang-Undang (UU) Kebebasan Informasi yang baru pada bulan

Februari 2013. Ini terjadi setelah satu dekade advokasi dan kampanye publik untuk mendorong perubahan di dalam hukum, termasuk hampir 10 bulan kerja intensif berbagai pihak yang dipimpin Pokja Kementerian Aparatur Negara. "Hampir semua masukan dan revisi kami masuk ke dalam draf," kata Vanja Škorić, Penasehat Hukum Senior dari GONG, sebuah organisasi pegawai pemilu di Kroasia. Penerapan UU Kebebasan Informasi yang baru juga merupakan salah satu langkah untuk memenuhi syarat masuk ke Uni Eropa per 1 Juli 2013. Bagi pemerintah Kroasia, keberhasilan pelaksanaan UU Kebebasan Informasi sangatlah penting. Peran masyarakat sipil adalah mengawasi dan mengevaluasi langkah ini, serta memastikan bahwa UU Kebebasan Informasi berdampak positif bagi masyarakat dan supremasi hukum di tahun-tahun berikutnya.

Kedua contoh tersebut menunjukkan perlunya masyarakat sipil turut serta merajut usaha dalam mempertahankan peran dan ruang mereka di masyarakat. Sementara itu di saat yang sama, masyarakat sipil juga perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk membawa perubahan sosial dan politik secara positif. Dengan mengembangkan Rencana Aksi Nasional, Kemitraan Pemerintah yang Terbuka (OGP) yang dimulai tahun 2011, telah memberikan peluang baru bagi masyarakat sipil mendorong pemerintah berkomitmen terhadap publik untuk meningkatkan transparansi, partisipasi warga dan akuntabilitas. Upaya ini dilakukan melalui penggunaan teknologi dan praktek-praktek inovatif. Bila dirumuskan secara benar dan melalui konsultasi dan kerja sama dengan masyarakat sipil, Rencana Aksi Nasional bisa membangun jalan bagi komitmen pemerintah yang konkret dan terukur. Mengacu pada sifat komitmen ini yang berlaku umum dan internasional, – serta dipantau secara independen –, ini menjadi semacam mandat bagi masyarakat sipil untuk melakukan tindakan nyata terhadap pemerintah. Selain itu, bisa juga meningkatkan profil masyarakat sipil sendiri dalam agenda politik di dalam negeri.

Dengan dukungan dari orang-orang penting seperti Presiden AS Barack Obama dan Presiden Brasil Dilma Rouseff, OGP telah menjadi inisiatif internasional terdepan di dunia untuk meningkatkan transparansi pemerintah. Tak kurang dari 60 negara sekarang telah berpartisipasi dalam OGP.

Apa arti cita-cita mulia OGP bagi warga negara?

Di Tanzania, warga desa yang didukung LSM menggunakan teknologi ponsel untuk melaporkan status persediaan air (apakah rusak, sumur kering, atau pipa bocor). Pemerintah mendapat informasi lantas memprioritaskan perbaikan. Maka, cara itu membantu mereka untuk memonitor dan mengelola sumber daya publik secara lebih efektif. Lebih penting lagi, pemerintah mengembalikan akses masyarakat terhadap air bersih dan meningkatkan kepercayaan rakyat atas kemampuan pemerintah daerah. Di banyak kota di dunia, pemerintah menerima informasi langsung dari warga tentang semua hal; mulai dari situasi jalan raya, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga kecelakaan lokal dan insiden kejahatan. Warga dan pemerintah lebih bekerja sama untuk menghasilkan dan menggunakan informasi yang tersedia demi menetapkan prioritas. Masing-masing pihak membahas bagaimana meningkatkan kualitas layanan dan bagaimana cara yang lebih baik untuk memonitor dan melacak, agar kualitas hidup warga dapat ditingkatkan.

PEMBELAJARAN YANG DIDAPAT SEJAUH INI

Pada kuartal pertama 2013, lebih dari 40 perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil dari 15 negara¹ diwawancarai dan dikonsultasikan pengalaman dan pembelajaran mereka dalam mengembangkan Rencana Aksi Nasional OGP yang pertama. Fokusnya ialah proses konsultasi awal dan mengembangkan mekanisme dialog yang berkelanjutan, serta tata pemerintahan bersama antara masyarakat sipil dan pemerintah. Sejumlah tema umum muncul dari wawancara tersebut, yang kemudian disajikan dalam makalah ini. Pun, dengan grafik yang berisi temuan-temuan kuantitatif yang terkait kerjasama pemerintah dan masyarakat sipil. Dengan mempelajari hal ini secara serius, masyarakat sipil dan para aktor pemerintah yang bekerja dalam OGP dapat membuat proses di negara mereka menjadi lebih lancar dan lebih efektif, dan tentunya akan meningkatkan dampak perubahan secara keseluruhan.

¹Brazil, Kosta Rica, Kroasia, Ghana, Indonesia, Kenya, Meksico, Moldova, Montenegro, Belanda, Peru, Filipina, Inggris, Ukraina dan Amerika Serikat. Kunjungi www.ogphub.org untuk membaca semua Artikel 15 Negara.

1. LETAKKAN PONDASI YANG KOKOH

“Pemerintah yang Terbuka untuk semua negara adalah menjadi terbuka (transparan) dan berbagi data. Data publik tidak (lagi) dimiliki pemerintah,” Francis Maude, Menteri Kantor Kabinet, Inggris.

Dorongan terhadap pemerintah agar terbuka sudah mengakar kuat di Inggris bahkan sebelum adanya OGP. Perdana Menteri David Cameron dengan berani menyatakan pemerintahan mereka merupakan yang paling transparan dalam sejarah. Meskipun awalnya ada rintangan dalam proses konsultasi Rencana Aksi Nasional, namun sebenarnya dasar yang kuat telah diletakkan sejak saat itu. Dialog antara masyarakat sipil dan pemerintah juga dibangun lebih baik dan ini telah berdampak pada dihasilkannya revisi Rencana Aksi. “Dalam membangun relasi dengan masyarakat sipil, seluruh tim di kementerian telah bekerja dengan sangat baik dalam menjalankan model pembuatan kebijakan secara terbuka”, kata Alan Hudson dari organisasi ONE.

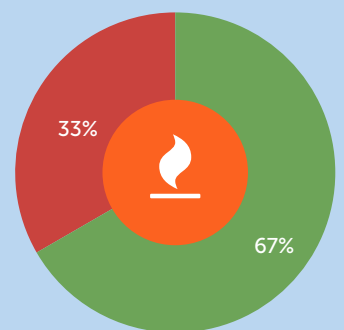
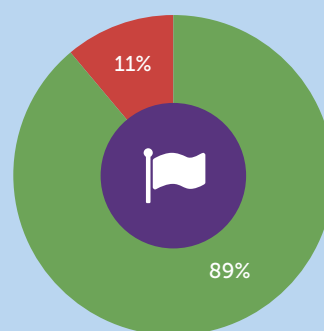
Akan lebih sulit untuk membangun pondasi kokoh bagi OGP jika masih ada tradisi yang bertentangan dengan inisiatif ini. Di Montenegro misalnya. Di sana, proses OGP menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang konsep- serta prinsip yang berlaku di OGP. “Keterbukaan bukanlah konsep yang diterima umum, dan kita sudah begitu terbiasa dengan sistem tertutup. Wargapun tidak menuntut apa-apa karena mereka memang tidak tahu nilai-nilai keterbukaan. Dan mereka tidak mengenali keterbukaan itu sebagai hal yang penting,” kata Milica Kovacevic dari Pusat Transisi Demokrasi di Montenegro.

Sementara itu di Moldova, pemerintah tengah memulai agenda e-Transformasi ketika mereka bergabung dengan OGP tahun 2011. Dalam kasus ini, agenda OGP telah dimanfaatkan untuk mengikutsertakan pemerintah, sehingga meningkatkan kerjasama antara warga, masyarakat sipil, sektor swasta dan pemerintah. Sebagai upaya membangun dasar yang kuat, pemerintah Moldova berkolaborasi dengan mitra-mitra pembangunan internasional. Ini memungkinkan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesadaran OGP dan sebanyak mungkin melibatkan peserta dalam konsultasi. “Isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah yang terbuka masih terus bermunculan di Moldova, dan tingkat pemahaman, kesadaran serta kapasitas organisasi masyarakat sipil di bidang ini masih rendah. Masyarakat sipil menganggap pendekatan yang dilakukan oleh e-Government Center memang sesuai dengan konteks,” kata Veronica Cretu, Koordinator Pokja Pemerintah untuk e-Government/Open Government dalam Dewan Partisipasi Nasional, sebuah kelompok yang segera dibentuk setelah Moldova menyetujui Rencana Aksi pada bulan April 2012.

Adalah penting bagi entitas yang tepat dalam pemerintahan untuk mengambil tampuk kepemimpinan dalam OGP, lantas menyeimbangkan pengaruh politiknya untuk memprioritaskan isu pemerintahan yang terbuka. Di banyak Negara, baik kantor Presiden atau Perdana Menteri ikut terlibat, begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Informasi. Dalam beberapa kasus, Kementerian Luar Negeri mengambil peran kepemimpinan tersebut. Merujuk ke salah satu kritik yang sering terdengar tentang OGP,

Apakah proses pengembangan rencana aksi yang pertama membantu meningkatkan rasa percaya dan kerjasama antara masyarakat sipil (👤) dan pemerintah (🏛️)?

- YA
- TIDAK



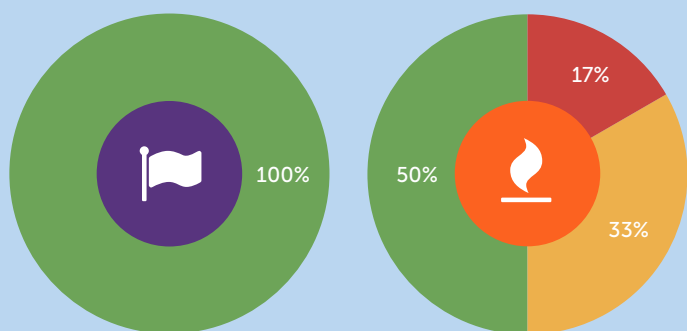
Katarina Ott, Direktur dari Institut Keuangan Publik, mengatakan bahwa 'saat ini merupakan waktu yang menyenangkan bagi Kroasia. Pemerintah harus menghindari memperlakukan OGP sebagai suatu kebijakan humas pihak asing, dan memastikan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh'. Pada saat yang bersamaan, akhirnya revisi Undang-Undang Akses terhadap Informasi menjadi komitmen konkret dalam rencana OGP Kroasia, sehingga masyarakat sipil bisa memiliki UU tersebut.

Adalah penting bagi entitas yang tepat dalam pemerintahan untuk mengambil tampuk kepemimpinan dalam OGP, lantas menyeimbangkan pengaruh politiknya untuk memprioritaskan isu pemerintahan yang terbuka. Di banyak Negara, baik kantor Presiden atau Perdana Menteri ikut terlibat, begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Informasi. Dalam beberapa kasus, Kementerian Luar Negeri mengambil peran kepemimpinan tersebut. Merujuk ke salah satu kritik yang sering terdengar tentang OGP, Katarina Ott, Direktur dari Institut Keuangan Publik, mengatakan bahwa 'saat ini merupakan waktu yang menyenangkan bagi Kroasia. Pemerintah harus menghindari memperlakukan OGP sebagai suatu kebijakan humas pihak asing, dan memastikan bahwa pemerintah akan bertanggung jawab penuh'. Pada saat yang bersamaan, akhirnya revisi Undang-Undang Akses terhadap Informasi menjadi komitmen konkret dalam rencana OGP Kroasia, sehingga masyarakat sipil bisa memiliki UU tersebut.

2. BUATLAH STRATEGI!

Bagi masyarakat sipil di Inggris, titik krisisnya ialah saat mereka menyadari betapa sempitnya lingkup Rencana Aksi Nasional yang pertama. "Dari sudut pandang kami, terlalu banyak penekanan pada Open Data yang Terbuka dan pengembangan Rencana Aksi tidak melibatkan proses konsultasi partisipatif. Ada banyak potongan lain yang belum tercakup, padahal seharusnya sudah dimasukkan," kata Simon Burrell dari Involve. Setelah April 2012, sejumlah organisasi datang dan secara kolektif mengirim surat kepada Menteri Francis Maude untuk melakukan lobi. Sejak itu, masyarakat sipil jadi lebih terorganisir dalam mendorong upaya-upaya masyarakat sipil, termasuk dalam menggalang dana. Hal ini mendukung keseluruhan proses OGP menjadi lebih terorganisir, terstruktur, dan secara bersama berhasil merevisi Rencana Aksi.

Pengalaman di Ukraina dalam membangun dialog konstruktif dengan pemerintah juga menunjukkan perlunya organisasi masyarakat sipil yang terorganisir, terkoordinasi dengan baik, dan pengaturan alokasi waktu yang tepat dalam menjalankan strategi advokasi. Hanya dalam enam bulan untuk mempersiapkan rencana tersebut, pemerintah Ukraina memilih untuk melakukan konsultasi, yaitu meminta masukan melalui jaringan dewan warga yang sudah terbentuk. Dewan ini terdiri dari organisasi yang sudah terbiasa memberikan saran kepada pemerintah lokal. The Civic Partnership atau Kemitraan Sipil, sebuah koalisi 50 LSM yang tidak dilibatkan dalam konsultasi, dengan tegas menolak 400 masukan atau lebih kepada



Persepsi pemerintah (🇮🇩) vs masyarakat sipil (🔥) atas antusiasme dan keterlibatan partisipasi CSO dalam pengembangan rencana aksi

- BAGUS ●
- SEDANG ●
- BURUK ●

pemerintah. Padahal di sisi lain, pemerintah mengaku telah menerima masukan-masukan tersebut.

“Kami menyadari bahwa ini konsultasi semu yang tergesa-gesa dan pemerintah sebetulnya menghindari dialog yang kritis. Kami tidak bisa mendukung rencana tersebut karena tidak mencerminkan kebutuhan riil negara Ukraina,” kata Oleksii Khmara, Presiden TORO Creative Union. The Civic Partnership kemudian mengirimkan surat terbuka kepada Presiden dan Perdana Menteri dan mencari dukungan dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memfasilitasi dialog dengan pemerintah. Setelah kampanye advokasi selama empat bulan, termasuk menyiapkan rencana aksi bayangan dan mengorganisir kegiatan konsultasi baru, dokumen akhir yang dibuat bersama oleh koalisi dan pemerintah akhirnya memasukkan sekitar 80% permintaan masyarakat sipil. “Kami akhirnya berhasil membangun kondisi untuk dialog, yang telah menguntungkan kedua belah pihak,” kata Oleksii.

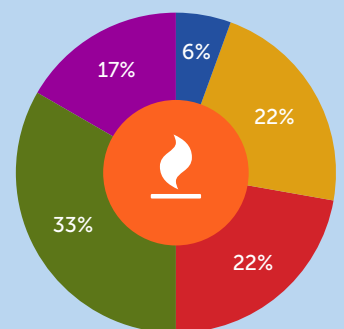
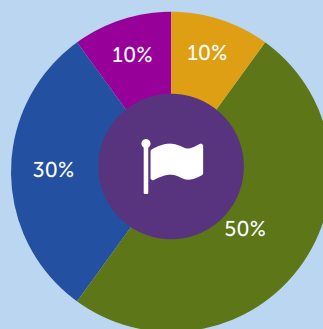
Bagi Meksiko, yang akan menjadi Ketua OGP berikutnya, yang ditekankan adalah meningkatkan kualitas keseluruhan Rencana Aksi kedua: menjadi lebih terorganisir untuk memastikan komitmen yang lebih strategis dan bisa lebih banyak membenahi pengelolaan sektor publik. “Kami memfokuskan waktu dan tenaga untuk membangun hubungan dengan pemerintahan federal yang baru demi melanjutkan pekerjaan kami di OGP, serta mengintegrasikan prioritas kami di dalam Rencana Aksi yang baru,” kata Gabriela Segovia dari IFAI.

Di Amerika Serikat, koalisi Open the Government (OTG) sudah memiliki hubungan kerja yang solid dengan pemerintahan Presiden Bush dan Obama yang terfokus pada pembuatan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. OGP memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat dalam negeri untuk mulai membangun di atas landasan ini serta ikut terlibat pada tingkat lain. “Kami mengambil peran untuk mengkoordinasikan dan melibatkan masyarakat sipil yang lebih luas dan beberapa organisasi internasional untuk mendorong pembentukan Rencana Aksi Nasional,” ujar Patrice McDermott dari OTG tersebut. Di satu sisi, masyarakat sipil di AS mengakui banyak hal telah dicapai dalam hal pelaksanaan berbagai komitmen. Di sisi lain, perhatian selanjutnya akan lebih ditekankan untuk memastikan walau dengan komitmen yang lebih sedikit namun lebih rinci dan berdampak lebih. Salah satu pelajaran yang bisa dipetik ialah jika proses ini tidak didorong dari luar, maka yang terjadi sangatlah sedikit. “Kita tidak bisa hanya duduk dan berharap semua hal akan terjadi,” kata Tom Blanton dari Arsip Keamanan Nasional.

Di Amerika Serikat, koalisi Open the Government (OTG) sudah memiliki hubungan kerja yang solid dengan pemerintahan Presiden Bush dan Obama yang terfokus pada pembuatan pemerintahan yang lebih terbuka dan transparan. OGP memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat dalam negeri untuk mulai membangun di atas landasan ini serta ikut terlibat pada tingkat lain. “Kami mengambil peran untuk mengkoordinasikan dan melibatkan masyarakat sipil yang lebih luas dan beberapa organisasi internasional untuk mendorong pembentukan Rencana Aksi Nasional,” ujar Patrice McDermott dari OTG tersebut. Di satu sisi, masyarakat

Berapa banyak masukan dari masyarakat sipil (🔥) tercermin dalam rencana aksi nasional pemerintah (🚩)?

- SEMUA
- KEBANYAKAN
- SETENGAH
- SEBAGIAN
- TIDAK TAHU



MENGAPA POLITISI TERTARIK MENJADI ANGGOTA OGP?

Bagi sebagian politisi, OGP adalah ruang saling berbagi visi pendalaman demokrasi dan membawa tata kelola pemerintahan yang baik bagi masyarakat. Hal ini termasuk, di antara banyak hal lainnya, meningkatkan pemberian layanan lembaga negara dan membuat masyarakat bersuara lebih keras terhadap layanan-layanan tersebut. Selain itu juga berarti mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan politisi mereka. OGP terlihat memberikan dukungan, dan juga tekanan, untuk bereformasi dari dalam.

Menjadi anggota OGP, bagi politisi memungkinkan mereka untuk bergabung dalam jaringan global, di mana mereka dapat bertukar pengetahuan dan pengalaman. Hal ini menawarkan kesempatan belajar serta mendapatkan bahan-bahan untuk mendukung advokasi.

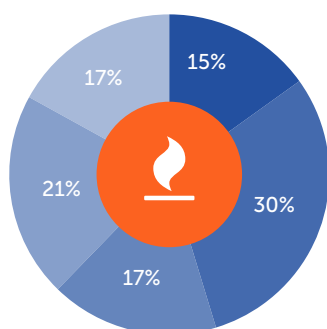
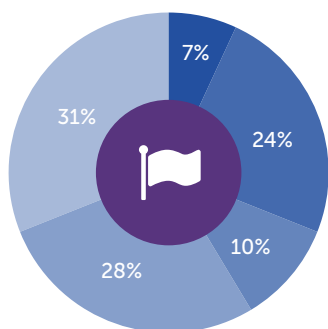
Sebagian politisi mencari inovasi. OGP menawarkan cara baru untuk mendobrak mekanisme kaku dan birokratis serta

meningkatkan kolaborasi di antara pemerintah dan masyarakat. Inovasi teknologi terkait dengan open data memungkinkan politisi memperpanjang e-agenda dalam negeri mereka. Inovasi di seputar open data juga dapat memperbesar kesempatan model bisnis baru.

Juga tak dapat dielakkan, meningkatkan citra di tingkat internasional dan "mengambil kesempatan berfoto dengan Presiden Obama" merupakan bagian dari daya tarik.

Secara substansi, di saat banyak negara telah memiliki banyak aktor masyarakat sipil yang aktif dan kuat saat bekerja dalam isu hak atas informasi, transparansi, dan akuntabilitas, OGP telah menyediakan platform bagi pemerintah untuk memunculkan agenda yang relevan dengan upaya perubahan.

image source: [Cabinet Office of the United Kingdom](#)



Motivasi pemerintah (🚩) untuk melibatkan masyarakat sipil (🔥) dalam proses rencana aksi?

- HUMAS / PUBLISITAS
- PERSYARATAN OGP
- BAIK UNTUK DILAKUKAN
- TUNTUK MENDENGAR PENDAPAT DARI BERBAGAI PIHAK
- UNTUK MEMBUAT KEPUTUSAN YANG LEBIH BAIK DAN TEPAT

sipil di AS mengakui banyak hal telah dicapai dalam hal pelaksanaan berbagai komitmen. Di sisi lain, perhatian selanjutnya akan lebih ditekankan untuk memastikan walau dengan komitmen yang lebih sedikit namun lebih rinci dan berdampak lebih. Salah satu pelajaran yang bisa dipetik ialah jika proses ini tidak didorong dari luar, maka yang terjadi sangatlah sedikit. "Kita tidak bisa hanya duduk dan berharap semua hal akan terjadi," kata Tom Blanton dari Arsip Keamanan Nasional.

Agar masyarakat sipil dapat menjadi efektif, mereka harus dibekali pengetahuan, proaktif dan terorganisir. Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil akan sangat bermakna apabila dikoordinasikan oleh lembaga penggerak atau calon 'pemimpin' yang punya keterampilan yang diperlukan, waktu dan penerimaan yang pas, serta punya visi yang melampaui kepentingannya sendiri. Dengan memiliki tokoh atau kelompok yang didorong dan dibiayai bersama-sama oleh komunitas organisasi masyarakat sipil akan menimbulkan rasa memiliki dan menjadikannya lebih berkomitmen.

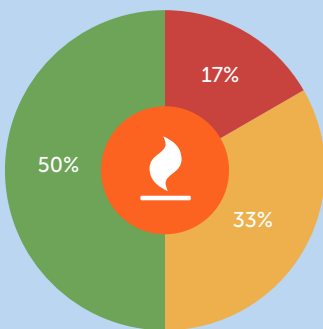
3. BUATLAH SEBUAH PLATFORM DIALOG

Rancangan Rencana Aksi dari Meksiko dan Indonesia (dua dari delapan anggota pendiri) yang dikritik karena terlalu umum, terlalu luas, sangat tidak strategis, serta sangat sedikit mencerminkan usulan atau perspektif masyarakat sipil.

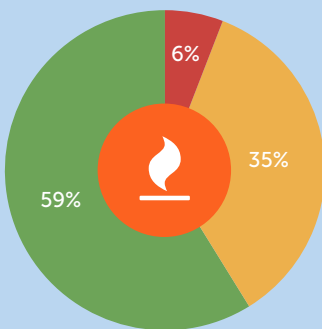
Di Meksiko, sebuah proses diskusi intens dimulai antara koalisi organisasi masyarakat sipil, Institut Perlindungan Data dan Akses Federal ke Informasi (IFAI), dan Kementerian Aparatur Negara, dalam bentuk Sekretariat Teknis Tripartit OGP (TTS), untuk membangun "Rencana Aksi yang lebih kuat atau berjangka waktu lebih lama." TTS didirikan untuk bekerja sebagai institusi permanen pengambil keputusan, pemantauan dan menjamin kepatuhan terhadap OGP dan telah terbukti menjadi sebuah platform yang efektif untuk dialog berkelanjutan dan mekanisme yang baik untuk mengarahkan dan memantau proses OGP di Meksiko.

Pengalaman Indonesia memang cukup rumit, dengan beberapa organisasi masyarakat sipil merasa tidak dilibatkan oleh Tim Inti yang dipilih oleh pemerintah yang mengerjakan Rencana Aksi. Meskipun saat ini

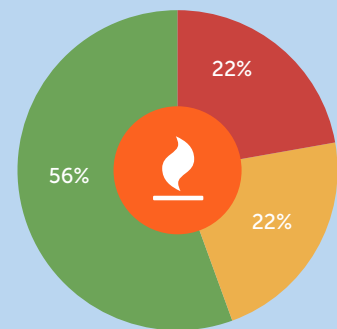
SUDUT PANDANG CSO:
Keseluruhan kualitas partisipasi masyarakat sipil selama pengembangan rencana aksi



SUDUT PANDANG CSO:
Kualitas penerimaan pemerintah terhadap masukan rencana aksi dari organisasi masyarakat sipil



SUDUT PANDANG CSO:
Kemungkinan bagi masyarakat sipil untuk terus memberi lanjutan masukan-masukan positif ke dalam rencana aksi



LEGENDA: ● BAGUS ● SEDANG ● BURUK

peran masyarakat sipil di dalam dan di luar proses OGP Indonesia terus diperdebatkan, "Suara masyarakat sipil, di dalam Indonesia dan ASEAN, sangatlah penting dan kami tidak boleh dikesampingkan jika ingin memiliki partisipasi dalam arti yang sebenarnya," ujar Maryati Abdullah dari Publish What You Pay.

Pengalaman OGP di Ghana telah ditandai oleh sejumlah awal dan akhir; pemilihan presiden mendominasi agenda nasional dan menjadi fokus pejabat pemerintah dan masyarakat sipil. Namun, segera pasca konferensi OGP di Brasil, alur mulai bergulir dan proses pembentukan komite OGP Ghana mulai mendapatkan momentum. Pemerintah mengadopsi strategi ganda untuk dialog dan untuk memperoleh representasi CSO - Koalisi Masyarakat Sipil dikonsultasikan. Organisasi tertentu didekati langsung untuk mencalonkan sepuluh wakilnya untuk duduk di dalam Komite Nasional OGP, yang totalnya memiliki 20 anggota. Selain bertemu enam atau tujuh kali di awal untuk mempersiapkan draft Rencana Aksi, seluruh anggota komite pergi retreat selama dua hari. "Ini benar-benar membantu kami untuk membangun diri sebagai tim sebelum kami mulai berjalan," ujar Vitus Azeem dari Inisiatif Integritas Ghana.

Kesediaan untuk bekerja sama jelas terlihat, di sisi lain masyarakat sipil serta pemerintah mengakui bahwa dialog yang baik membutuhkan banyak usaha jika ingin memperoleh hasil maksimal. "Kami telah belajar bahwa supaya OGP berjalan lancar dan efisien, komitmen pemerintah sangat penting. Partisipasi CSO juga sangat penting, dan sumber daya yang baik dan sekretariat yang berfungsi juga sangat diperlukan," ujar Effie Simpson Ekuban dari Sekretariat OGP. Mungkin sekarang situasinya sudah disiapkan untuk Ghana, supaya pada akhirnya RUU Akses terhadap Informasi yang telah terpendam di dalam parlemen selama sepuluh tahun terakhir bisa diloloskan.

Pengalaman Peru menunjukkan keterlibatan masyarakat sipil sejak awal dalam pembuatan kebijakan publik merupakan kunci keberhasilan. Hal ini terjadi melalui partisipasi dalam kelompok kerja sebagai platform kuat dalam melakukan dialog. Selain itu, masyarakat sipil mendapat kemenangan penting dengan diformalkannya proses OGP. Sebuah Putusan Mahkamah Agung, yang ditandatangani oleh Presiden, Perdana Menteri dan Kanselir, membuat sebuah Komisi Multi-Sektor permanen yang bertanggung jawab untuk menangani proses-proses ini. "Hal ini telah memvalidasi partisipasi masyarakat sipil dan

dengan ini ada tingkat keamanan yang lebih tinggi dan komitmen," ujar Samuel Rotta dari Proetica.

Keterlibatan masyarakat sipil harus dimulai sejak awal dan keanggotaan kelompok kerja atau komite pengarah harus secara luas terwakili. Anggota harus diseleksi dengan cara yang terbuka dan transparan, dengan menggunakan proses seperti seleksi mandiri, undangan, aplikasi dan pemilihan. Jika platform tersebut dilembagakan, hal ini lebih lanjut memastikan kontribusi dan meningkatkan keamanan, dan membuat mereka lebih tahan terhadap perubahan politik dan pergantian rezim. Penekanannya harus pada membangun ruang dialog terbuka yang berkelanjutan dan bukan pada sekadar pelibatan masyarakat sipil melalui satu kali konsultasi.

4. KONSULTASIKAN SECARA LUAS

Di negara-negara Amerika Latin, tantangan dalam menjangkau partisipasi di semua tingkat pemerintahan dan masyarakat sipil telah semakin luas. Selain populasinya yang multikultur, multi-bahasa dan multi-etnis. Negara-negara ini juga mengakui bahwa selanjutnya proses konsultasi mereka harus jauh lebih inklusif, di luar kelompok-kelompok 'elit' dan kelompok yang 'sudah biasa diikutsertakan'. Sampai saat ini, penekanan lebih pada bagaimana memperkuat dan menggaungkan elasi masyarakat sipil dengan pemerintah, serta membangun terus yang telah dicapai sejauh ini.

Di Meksiko, keputusan untuk tidak membatasi konsultasi publik disebabkan dua kendala penting: durasi waktudan momentum. Dengan waktu yang terbatas untuk mempersiapkan dokumen, dan dengan Rencana Aksi yang hanya mencakup 12 bulan, Sekretariat Teknis Tripartit lebih fokus untuk memastikan bahwa komitmen dan tindakan aksi yang cukup realistis, terukur dan dapat dicapai. Untuk Rencana Aksi berikutnya, proses yang lebih luas dan inklusif bakal disiapkan.

Di Brazil, teknologi telah digunakan untuk melibatkan lebih banyak warga dalam dialog. Dengan menggunakan situs e-Democracia, diskusi online tampak sudah bergerak maju. Awalnya dari menilai pelaksanaan Rencana Aksi Nasional pertama menuju tersedianya kesempatan untuk mengajukan komitmen baru, hingga meminta peserta memberikan suara (voting). Lantas akhirnya memilih usulan kunci yang

harus diprioritaskan oleh pemerintah. Dalam rangka semakin melibatkan masyarakat sipil, partisipasi telah secara aktif diupayakan mencakup serikat pekerja, LSM, gerakan sosial (misalnya komunitas LGBT dan keturunan bangsa afrika), organisasi berbasis agama, mahasiswa, akademisi, media dan kelompok data terbuka. Selanjutnya, jatah perwakilan berbagai daerah dan negara sekaligus memastikan keterwakilan wilayah. Namun, masyarakat sipil bersikap kritis mengenai sejauh mana saran yang dibuat dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam Rencana Aksi.

Di Kenya, pemerintahan baru Presiden Uhuru Kenyatta telah menempatkan teknologi digital sebagai strategi utama, sehingga menawarkan banyak peluang baru. Untuk mempromosikan agenda pemerintah yang terbuka, masyarakat sipil telah mendorong prinsip-prinsip ini ke dalam sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan. "Kami benar-benar ingin transparansi dan akuntabilitas diutamakan dalam pemerintahan dan dalam semua struktur yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk meningkatkan peluang bagi partisipasi warga," kata Gladwell Otieno dari AfriCOG .

Di Ghana, dengan pemilihan umum yang semakin dekat, konsultasi Rencana Aksi, yang berlangsung di tiga zona regional, dilakukan dalam periode dua bulan. Komite pengarah rencana aksi OGP Ghana didorong untuk turun ke lapangan. Di sinilah kerja mendasar dilakukan. Menyebarkan pesan OGP dan mengumpulkan masukan-masukan untuk komitmen yang diusulkan. Setiap kegiatan menarik 40 sampai 60 peserta dari partai politik, pelayanan publik, LSM dan media, serta tokoh adat dan agama. Dalam banyak kasus, wartawan hadir dalam jumlah yang terlalu besar. "Media tradisional masih sangat kuat dan berpengaruh di Ghana dan kami ingin acara peluncuran dan pertemuan regional diliput oleh surat kabar, radio dan TV," ujar Emmanuel Kuyole dari Revenue Watch Ghana. Walaupun panitia pengarah cukup puas dengan input yang diterima, jumlah peserta masih dianggap rendah. Sumber daya keuangan yang terbatas serta kurangnya waktu yang cukup disebut-sebut sebagai masalah utama. "Idealnya, kami seharusnya melibatkan seluruh sepuluh daerah dan tidak mengadakan konsultasi dalam waktu yang begitu dekat dengan pemilu," menurut Vitus Azeem dari Inisiatif Integritas Ghana. Meskipun konsultasi itu tidak sedalam yang diinginkan, Ghana adalah salah satu dari beberapa negara yang melakukan upaya nyata mengikutsertakan aspirasi warga.

Di Belanda, dengan banyaknya catatan yang menunjukkan pemerintah menyediakan informasi secara proaktif bagi warganya, dan di mana telah ada banyak keseimbangan, pemerintah menghadapi tantangan sedikitnya organisasi yang bekerja pada isu-isu tata kelola pemerintahan di tingkat nasional. "Tidak seperti di banyak negara lain, di Belanda tidak banyak orang yang khawatir untuk membuat pemerintahan menjadi lebih terbuka, dan masyarakat tidak banyak melakukan tekanan pada kami," ujar Mirjam Kalverda dari Kementerian Dalam Negeri. Berbagai konsultasi untuk OGP telah mengungkapkan bahwa warga ingin berkomunikasi secara lebih terbuka dengan pemerintah dan bahwa mereka menginginkan informasi lebih cepat dan mudah diakses, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal di sekitar mereka. 'Energi dan rasa ketertarikan terletak pada warga (dibandingkan dengan organisasi swasta) dan yang penting adalah untuk memulai proyek percontohan di tingkat lokal, bekerja sama dengan kota dan komite lingkungan," ujar Marjan Delzenne dari Pusat Pengawasan Anggaran dan Citizen Engagement.

Strategi satu solusi untuk semua masalah jelas tidak akan memadai. Secara umum, keterlibatan yang lebih luas dari para aktor, dari masyarakat sipil dan pemerintah, akan membuat proses lebih inklusif, dan lebih kuat. Pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas akhir dalam bentuk komitmen dan kegiatan bersama. Keterlibatan seperti itu akan membangun komunitas pembaharu yang lebih luas yang mendorong agenda bersama. Seluruh proses sangat bergantung pada pengembangan strategi - dan keinginan yang tulus - untuk mengumpulkan masukan dan komentar, memberikan umpan balik dan juga saran.

5. MEMBANGUN KEMITRAAN

Di dua negara Macan Asia - Indonesia dan Filipina - OGP telah diterima baik. Di Indonesia, OGP telah menjadi bagian dari Rencana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik serta Rencana Anti-Korupsi, dan di Filipina OGP telah diadopsi dalam inisiatif strategis. Namun, di kedua negara, upaya masyarakat sipil untuk membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah mengenai proses Rencana Aksi OGP ini masih terus berlangsung. Hal ini sangat bergantung pada proses kesepakatan tentang apa yang menjadi prioritas dan bagaimana menemukan kesamaan.

Di Filipina, RUU Kebebasan Informasi yang sudah lama tertunda telah menjadi fokus utama advokasi

masyarakat sipil. Akses terhadap Informasi adalah prinsip dasar dari OGP, sebuah nilai yang menguatkan komitmen dari semua negara peserta,” ujar Annie Geron dari kampanye Hak untuk Tahu, Sekarang! Walaupun pemerintah mengakui pentingnya RUU tersebut, pemerintah juga menganggap Rencana Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Anti-Korupsi yang ada sudah cukup untuk menciptakan kebebasan informasi yang diperlukan.

Di satu sisi perdebatan terus berlangsung di Indonesia mengenai apakah masyarakat sipil harus tetap pada perannya. Apakah tetap menjadi pengawas dan bukan terlibat dalam Tim Inti yg dipilih oleh Pemerintah. Di sisi lain tetap penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk menemukan keseimbangan, suatu titik yang kerja sama yang konstruktif.

Sebagai contoh, pengalaman di Inggris dan AS menunjukkan bagaimana kemitraan positif antara masyarakat sipil dan pemerintah dapat dibina, dan dapat berlanjut ke Rencana Aksi Nasional yang disusun bersama, yang relevan dan tampaknya ambisius. Di Inggris, jalan untuk mengembangkan revisi Rencana Aksi Nasional, seperti dijelaskan di atas, telah memfasilitasi terjadinya perbaikan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil sepanjang tahun 2012; hal ini telah membuat kemitraan menjadi lebih berisi. “Saya sangat bangga dengan bagaimana kita bekerja sama; terbuka, jujur, konsisten dan relevan tentang bagaimana mengidentifikasi daerah bersama dalam hal kepentingan dan tujuan,” ujar Ilaria Miller dari Tim Transparansi Kantor Kabinet Inggris.

Di AS, hubungan yang sudah ada antara masyarakat sipil dan pemerintah mengenai pemerintah yang terbuka sangat membantu untuk membangun kemitraan yang solid. OGP memberikan kesempatan yang baik bagi masyarakat dalam negeri untuk mengambil hubungan ini lebih lanjut dan terlibat pada tingkat lain. Walaupun banyak yang dapat dilakukan untuk memperbaiki Rencana Aksi Nasional berikutnya, masyarakat sipil menyadari tantangan yang akan dihadapi, dan sudah berencana untuk itu. “Pemerintah memiliki banyak prioritas yang bergeser dan kadang-kadang ada hal-hal yang tidak terlihat. Masyarakat sipil harus memiliki informasi itu,” kata Tom Blanton dari Arsip Keamanan Nasional. Dengan mengambil pelajaran sejauh ini dari proses OGP di negara-negara tersebut, maka hal itu juga meningkatkan kemungkinan bahwa masyarakat sipil dan pemerintah akan bekerja sama secara produktif.

Dalam banyak kasus, negara terlibat dalam mengembangkan kapasitas lembaga nasional dan internasional untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan aktif. Memang perlu waktu dan usaha untuk membangun kepercayaan dan hubungan kerja antara pemerintah dan masyarakat sipil. Perlu saling percaya dan memahami satu sama lain. Para pelaku juga harus lebih mendengarkan dan menghargai berbagai sudut pandang, tetap berpikiran terbuka dan tetap berpikir kritis, dan harus terlibat secara konstruktif. Masyarakat sipil seringkali ditarik ke dua arah di mana mereka juga memiliki peran sebagai pengawas. Sebagai mitra, mereka terkadang sulit untuk menemukan landasan bersama, untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Membangun kemitraan, sederhananya, adalah proses yang tak mudah dan memakan waktu.

CATATAN PENUTUP

"Ketika pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, ketika pemerintah terbuka dalam mengambil keputusan dan mengalokasikan sumber daya, mengatur keadilan dan mengambil sikap tegas terhadap korupsi, pemerintahan tersebut mempunyai kesempatan lebih besar untuk berhasil dalam menerapkan kebijakan dan pelayanan yang efektif kepada rakyatnya." (Hilary Clinton, pertemuan Open Government Partnership, Juli 2011)

OGP telah, dalam banyak hal, memfasilitasi pembentukan platform antara pemerintah dan warganya. Dalam hal ini, aktor-aktor tersebut dapat bersatu dan mengembangkan Rencana Aksi Nasional dengan agenda bersama berupa komitmen dan tindakan yang akan terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Tingkat kerja sama yang dicita-citakan OGP, hanya dapat dilihat sebagai upaya untuk melawan kecenderungan dikotomis dimana ada peningkatan keterbukaan di satu sisi dan peningkatan kerahasiaan di sisi lain. Proses duduk bersama ini menjadi hal berharga dan bagi banyak pihak merupakan sesuatu yang baru. Bagi pemerintah, proses ini adalah tentang peningkatan dan adopsi standar baru, standar yang modern untuk demokrasi partisipatif dan membawa suara serta tuntutan warga, yang sering terabaikan oleh negara, ke hadapan mereka sendiri dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan.

Penting bagi masyarakat untuk tahu bahwa di dalam negara terdapat para pamong (pegawai negeri) yang juga tertarik mempromosikan keterbukaan dan akuntabilitas, sekalipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ada banyak hal yang bisa dipelajari oleh masyarakat sipil dalam 18 bulan terakhir mengenai pengalaman OGP yang beranekaragam dan perbaikan yang diperlukan untuk memaksimalkan hasil dari proses konsultasi. Pelajaran ini seharusnya membuat masyarakat sipil mampu mempromosikan nilai tambah lain dari prinsip-prinsip pemerintah yang terbuka.

Pada akhirnya, masyarakat sipil harus lebih paham tentang isu-isu ini. Kita harus proaktif dan terorganisir dengan baik serta harus lebih profesional ketika berkomunikasi dengan Pemerintah. "Kita tidak bisa menjadi lemah dan pasif. Jika kita tidur, bisa-bisa negara akan tidur," demikian disimpulkan oleh Oleksii Khmara dari Ukraina.

image source: [Wikimedia Commons](#)